

Analysis Of The Relationship Between Land Transportation And Economic Growth In Ambon City For The 2012-2021 Period

Analisis Keterkaitan Transportasi Darat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Ambon Periode 2012-2021

M. Ratmasa Serang^{1*}, Harvey Hiariey²

Universitas pattimura^{1,2}

mserang71@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how much the development of facilities, and infrastructure such as the number of vehicles, the length of the road, which is related to economic growth in Ambon City. And you want to find out how much influence government spending in this case capital expenditure on road infrastructure development on economic growth in Ambon City. This research was located in Ambon City. Data obtained from the Central Statistic Agency (BPS) of Ambon City, about GRDP, road length, number of vehicles, and economic indicators. The Simple Regression Method is to analyze data to determine the effect of government spending in this case road financing for land transportation on the economic growth of ambon city. From the regression results, government expenditure has a coefficient value of 0.270621 with a statistical value of 2.762270 with a significance level where the probability level is 0.0211 where the value < 0.05 so it can be said to be significant at $\alpha = 0.05$. This shows that the relationship of government spending to the economic growth of Ambon City is positive and significant. So it can be said that if government spending increases by 1% then economic growth also increases by 0.270621% assuming ceteris paribus.

Keywords : Government spending, economic growth

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perkembangan sarana, dan prasarana seperti jumlah kendaraan, panjang jalan, yang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja modal pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Penelitian ini berlokasi di Kota Ambon. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, tentang PDRB, panjang jalan, jumlah kendaraan, serta indikator ekonomi. Metode Regresi Sederhana yaitu menganalisis data untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal ini pembiayaan jalan untuk transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. Dari hasil regresi, pengeluaran pemerintah mempunyai nilai koefisien sebesar 0.270621 dengan nilai statistik sebesar 2.762270 dengan tingkat signifikansi di mana tingkat probabilitas adalah sebesar 0,0211 dimana nilainya < 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah naik 1% maka pertumbuhan ekonomi juga naik sebesar 0,270621% dengan asumsi ceteris paribus.

Kata Kunci: Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi.

1. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian di Indonesia sangat gencar-gencarnya, tentu sangat membutuhkan tenaga dan pemikiran yang sangat dalam, apalagi dalam hal sarana penunjang seperti sarana transportasi. Transportasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, bidang transportasi juga merupakan lahan bisnis sebagaimana sektor ekonomi lainnya. Bidang angkutan ini mencakup angkutan laut, angkutan jalan raya, angkutan sungai, angkutan udara, angkutan rel, dan jasa penunjang angkutan. Perkembangan bidang

angkutan dapat dilihat dari kontribusi masing-masing jenis angkutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika kita melihat perkembangan sarana transportasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat drastis seperti kita dapat melihat bahwa untuk menjangkau atau memesan sarana angkutan saja kita dapat memesan hanya dengan menggunakan aplikasi pada smartphone.

(*Todaro, 2000*) menjelaskan bahwa salah satu komponen utama yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Seperti Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku untuk meningkatkan stok modal (*capital stock*) secara fisik di suatu negara dan hal itu memungkinkan terjadinya peningkatan output jangka panjang.

Menurut (*Sukirno, 2006*), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*.

Transportasi melayani angkutan penduduk dari rumah ke tempat pekerjaannya (sawah/ladang dan pabrik/industry). Transportasi melayani angkutan komoditas/barang hasil produksi ke pasar-pasar dan selanjutnya ke konsumen-konsumen akhir di pasar. Jadi kegiatan produksi dirangkaikan oleh kegiatan transportasi menuju ke kegiatan konsumsi. Rangkaian kegiatan produksi – transportasi – konsumsi telah berlangsung sejak dahulu kala, sejak permulaan peradaban manusia.

Dalam rangka terselenggaranya kegiatan transportasi yang efektif tentu memerlukan sarana dan parasarana yang efektif dan memadai. Karena itu sangat diperlukan investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sarana dan parasarana jalan raya. Infrastruktur itu mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi maupun sosial (*Tanimart, 2008*). Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kegiatan masyarakat. Pada prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat merupakan infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani aktifitas dan kebutuhan masyarakat berskala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah merupakan infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya.

Dengan adanya sarana dan prasarana infrastruktur jalan raya yang memadai maka akan terselenggaranya sistem transportasi yang efektif dan efisien, yang dapat melayani angkutan barang dan orang antar kota, antar daerah dan antar pulau secara baik dan lancar, cukup aman, dan murah. Pergerakan barang dan orang antar kota, antar daerah, dan antar pulau dilaksanakan untuk melayani kegiatan perekonomian dan pembangunan pada sektor-sektor lain di berbagai wilayah dan daerah tertentu. Terdapat hubungan yang erat antara transportasi (barang dan orang), kegiatan perekonomian dan pembangunan, serta dimensi tata ruang wilayah.

Menurut (*Susantono, 2013*), pembangunan infrastruktur di Indonesia seolah mendapat

kembali momentum melalui peluncuran *MP3EI* pada 27 Mei 2011. *MP3EI* dimaksudkan untuk membuat terobosan (*breakthrough*) dan bukan "*business as usual*" untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. *MP3EI* kini menjadi panduan bagi proses perencanaan nasional yang menggabungkan konsep perencanaan kewilayahan dan sektoral. Maksud dan tujuan pokok daripada *MP3EI* adalah memperkokoh landasan perekonomian daerah, melalui usaha untuk memacu/meningkatkan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Keberhasilan pembangunan di daerah, yang merupakan salah satu tolok ukurnya adalah tingkat capaian PDRB-nya. Peningkatan PDRB yang signifikan tentu berdampak langsung pada *Produk Domestik Bruto* (PDB). Sehubungan dengan itu, maka laju PDRB sangat ditentukan oleh pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai dan handal di daerah. Hubungan antar kota kabupaten dengan kota kecamatan rata-rata melalui jalan raya, dimana di Kota Ambon pada saat ini sebagian besar kondisi jalan masih berupa jalan tanah, dimana pada saat musim hujan hubungan transportasi antara kota dengan kecamatan dan daerah sekitar mengalami hambatan karena kondisi jalan yang berlumpur dan rusak.

Pada tahun 2020 panjang jalan di Kota Ambon 498,42 kilometer yang terdiri atas 90,00 kilometer jalan nasional, 89,61 kilometer jalan provinsi dan 317,81 kilometer merupakan jalan kota. Dari total panjang jalan di Kota Ambon panjang jalan yang telah diaspal mencapai 309,01 kilometer atau sebesar 67,67 persen dan sisanya hanya berupa jalan tanah dan jalan aspal yang telah rusak dimana pada saat kondisi musim hujan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Menurut kondisi jalan, panjang jalan dengan kondisi baik sekitar 283,63 km (1,90 persen), kondisi jalan sedang 7,73 (39,96 persen) sementara untuk jalan rusak dan rusak berat 17,65 km (17,51 persen) dan 180,16 (2,76 persen). Melihat gambaran di atas, sebagian besar infrastruktur jalan raya di Kota Ambon masih kurang baik karena masih sebagian besar belum diperbaiki sehingga sangat mengganggu hubungan arus barang dan jasa antara Kota Ambon dengan daerah yang ada disekitarnya, sementara akses untuk mencapai kota kecamatan dengan Kota Ambon sebesar 80% melalui jalan darat dengan kondisi yang sebagian besar jalan masih buruk atau rusak.

Dengan rencana berlakunya LIN dan Ambon New Port yang terletak pada dua lokasi berbeda namun masih berdampingan, di mana lahan untuk LIN berkisar 700 hektar yang dimulai dari PLTU Waai ke Dusun Batu Dua yang akan terdampak proyek ini. Sedangkan untuk Ambon New Port dari Tulehu yang berbalik cukup besar tersebut diharapkan adanya pembenahan atas infrastruktur jalan segera sehingga dapat dilakukan guna percepatan pembangunan ekonomi di Kota Ambon maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi menuju arah Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah seluas 200 hektar. Dengan akan diberlakukannya LIN dan Ambon Newport, maka Kota Ambon juga akan menikmati anggaran yang cukup besar dari pemerintahan pusat guna percepatan pembangunan di Indonesia timur utamanya provinsi Maluku. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam APBD merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah.

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat seperti ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku seperti Kota Ambon misalnya tahun 2016 pertumbuhan ekonominya mencapai 6,15 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 6,17 persen kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan lagi mencapai 6,21 persen dan pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga hanya mencapai 5,81 dan kembali mneurun pada tahun 2020 sebesar -1,95 persen dari tahun sebelumnya. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 ini merupakan kelanjutan penerbitan dari serial publikasi pada tahun-tahun sebelumnya yang disusun dan diterbitkan oleh Badan

Pusat Statistik Kota Ambon. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan ekonomi Kota Ambon secara deskriptif. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kota Ambon mengalami penurunan dari 10,39 triliun rupiah pada 2019 menjadi 10,19 triliun rupiah pada tahun 2020. Kontraksi sebesar -1,95 persen ini disebabkan oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha yang turut dipengaruhi pandemi Covid-19.

Adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, maka akan berdampak pada ketersediaan kapasitas infrastruktur transportasi yang memadai. Sedangkan untuk mengimbangi keterbatasan infrastruktur diperlukan anggaran yang minimal pula. Namun, yang terjadi adalah peningkatan permintaan yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur transportasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Ambon. Kondisi demikian tentunya berdampak pada pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur transportasi yang terbatas sehingga mempengaruhi *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Kota Ambon, yang belum tinggi pula. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan laju PDRB Kota Ambon sejak Tahun 2016 – 2020, berdasarkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2010, menunjukkan laju peningkatannya, hanya berkisar 4,17 persen per tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perkembangan sarana, dan prasarana seperti jumlah kendaraan, panjang jalan, yang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja modal pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.

2. Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut *Prof. Simon Kuznets*, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Jadi, “pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat”.

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor- faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut (Sukirno, 2011), di dalam buku (*Lincolyn Arsyad*). “perbedaan penting dengan pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita”. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai menelaah faktor- faktor tertentu dari pertumbuhan output jangka menengah dan jangka panjang, faktor-faktor penentu pertumbuhan adalah tenaga kerja penuh, teknologi tinggi, akumulasi modal yang cepat, dan tabungan sebagai investasi yang tergantung pada besarnya pendapatan masyarakat.

Para ahli ekonomi sudah sejak lama berusaha untuk memahami konsep pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat di suatu negara. Dari pemikiran mereka ini, dihasilkanlah teori pertumbuhan ekonomi yang bisa kita pelajari sampai sekarang. Teori

pertumbuhan ekonomi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni teori klasik, teori neoklasik, teori neokeynes, teori *W.W. Rostow*, dan teori *Karl Bucher*. Berikut penjelasannya.

Adam Smith adalah seorang tokoh klasik yang banyak membahas mengenai teori-teori ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Dimana dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealrth of Nation (1776)*, *Adam Smith* menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Dalam perhitungan output total dilakukan dengan tiga variabel, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital atau modal. Sedangkan untuk faktor kedua, yaitu pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan luasnya pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran *David Ricardo* dalam hal pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal adalah tentang *the law of diminishing return*. Pemikirannya ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Investasi

Menurut Mubyanto (Sinaga, 2016) "Investasi dapat pula didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada". Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal atau akumulasi modal. Dengan demikian, di dalam makro ekonomi pengertian investasi tidak sama dengan modal. Dalam makro ekonomi, investasi memiliki arti yang lebih sempit yaitu jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambahkan stok modal dalam periode tertentu. Sedangkan modal merupakan stok ketika nilai uang dari gedung-gedung, mesin-mesin, dan inventaris lainnya adalah tetap pada suatu waktu".

Inventasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian dari penghasilan demi meningkatkan kemampuan, menambah/menciptakan nilai hidup (penghasilan dan kekayaan). Investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut (Mulyadi, 2001), "Investasi adalah "sebuah keterkaitan dari sumber-sumber yang dalam suatu periode dengan masa yang panjang untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa selanjutnya". Menurut (Martono dan D. Agus Marjito, 2002), "Investasi adalah "merupakan penanaman dari modal atau dana yang dilakukan pada suatu perusahaan untuk kemudian dimasukkan menjadi sebuah aset dengan sebuah harapan untuk dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa yang akan datang". Menurut (Boediono, 2001), "Investasi adalah "suatu pengeluaran dari sektor produsen untuk melakukan pembelian sebuah barang dan jasa yang akan digunakan untuk semakin menambah stok dan semakin memperluas area dari pabrik itu sendiri". Menurut (Hendry Simamora, 2000), "Investasi adalah aktiva yang digunakan pada sebuah *company* untuk meningkatkan pertumbuhan kekayaan lewat distribusi dari hasil investasi. Contohnya royalti, bunga, deviden, pendapatan sewa dan berbagai hal lainnya. Bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan melalui hasil hubungan perdagangan yang diperoleh melalui cara berinvestasi".

Transportasi

Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan (Adisasmita, 2011).

Sejarah perkembangan manusia terhadap perkembangan kota dapat kita lihat bahwa manusia selalu berhasrat untuk bepergian dari suatu tempat ke tempat lain guna mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. Dimana manusia sangat membutuhkan suatu sarana transportasi yang disebut moda atau angkutan (Rahardjo, 2010). Dimana proses transportasi tercipta akibat perbedaan kebutuhan antara manusia satu dengan yang lainnya, antara satu tempat dengan tempat lainnya, yang bersifat kualitatif dan mempunyai ciri berbeda sebagai fungsi dari waktu, tujuan perjalanan, jenis yang diangkut, dan lainnya.

Transportasi juga menciptakan guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*), karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain itu barang tersebut di angkut dengan cepat sehingga sampai di tempat tujuan tepat waktu dalam memenuhi kebutuhan. Transportasi adalah kegiatan jasa pelayanan (*services activities*). Jasa transportasi diperlukan agar membantu kegiatan sektor-sektor lainnya seperti (sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lainnya) untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut.

Karena itu jasa transportasi dikatakan sebagai *derived demand* atau permintaan yang diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan dalam melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meningkat. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain.

Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sektor*) bagi perkembangan ekonomi. (Nasution, 2015). Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap, perlu dicapai keseimbangan antara penyedia dan permintaan jasa angkutan. Jika penyedia jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya, maka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan merugi dan menghentikan kegiatannya sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan keguncangan harga di pasaran.

Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi." Atau juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut (Zaini Ibrahim, 2013), "Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah". Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Menurut (Rozalinda, 2015), "Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi".

Akibat adanya keadaan tertentu mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi

masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Rudy Badrudin menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembangunan atau disebut pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005).

Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan (Ikhsantono, 2005) dengan judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan. Penelitiannya menggunakan PDRB pada sektor transportasi untuk variabel terikat dan pengeluaran pemerintah untuk variabel bebas dengan menggunakan program Eviews 5.1 hasilnya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor transportasi pada tingkat kepercayaan 99 %.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Silaban, 2002) dengan judul Analisis Peranan Transportasi Darat dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. Dimana penelitiannya menggunakan PDRB sebagai variabel terikat. Panjang jalan, Jumlah moda transportasi dan pajak Kendaraan bermotor sebagai variabel bebas dengan menggunakan program Eviws 4.1. Hasilnya adalah Panjang jalan, Jumlah kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai $R^2 = 0,86$. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Fahruky, 2005) dengan judul Analisis Peranan Sektor Transportasi dan Telekomunikasi Terhadap PDRB Sumatera Utara. Penelitiannya juga menggunakan PDRB pada sektor transportasi dan telekomunikasi sebagai variabel terikat, panjang jalan dan jumlah pengguna telepon telkom sebagai variabel bebas dengan menggunakan program Eviews 5.1 hasilnya adalah panjang jalan dan jumlah pelanggan telepon Telkom berpengaruh nyata atau signifikan terhadap PDRB sektor transportasi dan telekomunikasi Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 99%.

Demikian pula penelitian yang di lakukan oleh (Desi, 2010) dengan judul Analisis

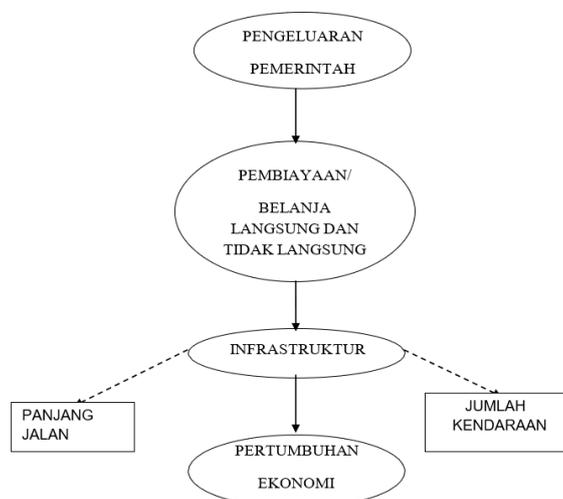
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 1969- 2009. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas perumahan, dan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur, sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak signifikan berpengaruh. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sarana, 2005) dengan judul “Peranan Sektor Transportasi Darat Dalam Pemulihan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat “ menarik kesimpulan bahwa transportasi darat mempunyai peranan yang penting dalam rangka pemulihan ekonomi di provinsi sumatera barat, dimana transportasi darat mempunyai sumbangan positif terhadap PDRB provinsi Sumatera Barat.

Kerangka Konseptual

Seperti dikemukakan oleh *E.S Domar dan R.F. Harrod* melihat bahwa pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stock barang modal, yang memungkinkan meningkatkan output. Dimana investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pemerintah dalam perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan output dikemudian hari dan bersifat jangka panjang. Output yang terakumulasi secara simultan dan berkesinambungan tentu mempunyai pengaruh terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian terhadap suatu daerah.

Dengan adanya investasi pemerintah berupa pengeluaran berupa pembiayaan terhadap infrastruktur jalan, maka infrastruktur jalan yang baik disertai dengan bertambahnya panjang jalan dapat melancarkan arus barang dan jasa serta mobilitas manusia dalam mencapai lokasi sumber-sumber ekonomi secara optimal serta dapat menghubungkan mata rantai dari arus bahan baku, untuk produksi, dan arus distribusi barang jadi yang disalurkan ke pasar serta kebutuhan pertukaran barang di pasar. Dengan infrastruktur jalan yang bagus maka akan meningkatkan dan mempercepat arus barang dan jasa yang tentu mempunyai akibat terhadap perputaran barang dan jasa secara cepat dan berujung kepada meningkatnya perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam pembiayaan jalan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
 Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan serta membaca literatur-literatur, artikel-artikel, serta karangan ilmiah lainnya yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas, sehingga dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*field research*)
 Penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi yang dimaksud adalah dalam bentuk wawancara langsung dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan pada obyek yang berkaitan, Seperti BPS, Dinas Perhubungan dan Bappeda Kota Ambon.

Data Jenis dan Sumber

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, baik berupa data statistik maupun informasi tertulis lainnya. Sumber Data tersebut bersumber dari :

1. Badan Pusat Stasistik (BPS) Kota ambon, tentang PDRB, panjang jalan, jumlah kendaraan, serta indikator ekonomi lainnya yang terkait dengan penulisan ini.
2. Dinas Bina Marga Kota Ambon, dan
3. Referensi berupa jurnal, laporan-laporan terkait dengan penulisan ini.

Metode Analisis

Dalam membahas permasalahan dan membuktikan hipotesis yang dikemukakan, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif (deskriptif) dan metode regresi sederhana. Metode analisis kualitatif (*Deskriptif*) yakni menganalisis data tentang perkembangan sarana dan prasarana transportasi darat yang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota ambon.

Metode Regresi Sederhana yaitu menganalisis data untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal ini pembiayaan jalan untuk transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota ambon dan dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut :

$$Y = f(X) \dots\dots\dots$$

Dengan demikian sebagai dasar untuk estimasi maka persamaan (1) secara eksplisit dapat dinyatakan ulang sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 X^{\beta_1} e^{\mu} \dots\dots\dots$$

Kemudian persamaan (2) ditransformasikan menjadi linear dengan logaritma natural (Ln) untuk persamaan estimasi regresi persamaan (3) sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X + \mu \dots\dots\dots$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (dalam hal ini PDRB ADHK, dan satuan rupiah) X = Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)

β = Koefisien Regresi μ = Error Term

4. Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan PDRB Kota Ambon

Tahun 2012 nilai tambah sektor-sektor ekonomi di Kota ambon mencapai 4.087.380,27 triliun rupiah dari posisi tahun 2020 yang hanya sebesar 1.038.038,80 triliun rupiah, sementara nilai tambah atas dasar harga konstan mencapai 1.627.459,84 triliun rupiah dari posisi tahun 2020 sebesar 896.217,89 ratus juta rupiah. Berikut adalah data

perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB Kota Ambon atas dasar harga berlaku dan konstan.

Tabel 1. PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2012-2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Konstan	
	Nilai (Jutaan Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Jutaan Rp)	Perkembangan (%)
2012	825 571,65		726,945.40	106,90
2013	965 766,72	116,98	774,682.44	106,57
2014	1 127 684,22	116,77	838,667.92	108,26
2015	1 233 418,83	109,38	883,062.30	105,29
2016	1 291 619,70	104,72	902,135.74	102,16
2017	1 344 404,40	104,09	943,469.75	89,27
2018	1 457 893,20	108,44	1 000 798,80	106,08
2019	1 554 327,75	106,62	1 043 660,89	4,29
2020	1 327 380,00	85,40	900 590,00	86,29
2021	1.201.380,27	90.51	901.459,84	100,09

Sumber : PDRB Kab. Ambon 2016 dan 2021

Struktur ekonomi merupakan pembentuk dari PDRB Kota Ambon yang berasal dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Ambon. Kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap tingkat PDRB Kota Ambon dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Hasil Regresi

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y maka akan dilakukan perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan Eviews 3.0. Hasil perhitungan regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Rekapitulasi data hasil regresi

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/07/22 Time: 18:03				
Sample: 2012 / 2021				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20566.29	2457.053	6.876965	0.0000
X	0.270621	0.101435	2.762280	0.0211
R-squared	0.504949	Mean dependent var		27723.70
Adjusted R-squared	0.444092	S.D. dependent var		187.6658
S.E. of regression	146.3649	Akaike info criterion		13.00046
Sum squared resid	163731.3	Schwarz criterion		13.05107
Log likelihood	-63.00278	F-statistic		7.182644
Durbin-Watson stat	0.769857	Prob(F-statistic)		0.021067

C adalah konstanta/intersep, X adalah pengeluaran pemerintah

Interpretasi Hasil

Berdasarkan data pada tabel di atas maka diperoleh model dari perhitungan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

$$\ln Y = 20566.29 + 0.270621 * \ln X + e$$

Konstanta/Intersep

Dimana Hasil regresi menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas X (pengeluaran pemerintah) maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon 557 adalah sebesar 20566.29. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh *E.S Domar dan R.F. Harrod* yang melihat bahwa pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stock barang modal, yang memungkinkan meningkatkan output. Dalam hal ini investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pemerintah dalam perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan output dikemudian hari dan bersifat jangka panjang. Output yang terakumulasi secara simultan dan berkesinambungan tentu akan memberikan pengaruh terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian terhadap suatu daerah.

Pengeluaran Pemerintah (X)

Maka dengan demikian dari hasil regresi, pengeluaran pemerintah (X) mempunyai nilai koefisien sebesar 0.270621 dengan nilai t statistik sebesar 2.762270 dengan tingkat signifikansi di mana tingkat probabilitas adalah sebesar 0,0211 dimana nilainya $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah naik 1% maka pertumbuhan ekonomi juga naik sebesar 0,270621% dengan asumsi ceteris paribus. Oleh karena variabel pengeluaran pemerintah (X) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) maka hipotesis diterima.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil Regresi menunjukkan bahwa variasi *variabel independen* (pengeluaran pemerintah) dapat dan mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 40,49%.

Adapun sisanya sebesar 38,41% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil perhitungan empiris tersebut sesuai dengan teori *Harrod – Domar* yang menyatakan bahwa pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh *Wagner* dan pasangan ahli ekonomi *Peacock dan Wiseman* bahwa Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji T-statistik

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah variabel terikat dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel bebas secara nyata. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H1 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

Dalam tabel hasil regresi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,762270 > 2,252146$). Dengan demikian H1 diterima artinya variabel pengeluaran pemerintah akan berpengaruh nyata pada variabel pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikan 5%. Hasil dari uji t di atas pengeluaran pemerintah

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan hipotesis dan signifikan secara statistic.

Variabel pengeluaran pemerintah atas infrastruktur jalan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon yang dilakukan dalam penelitian ini juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *E.S Domar dan R.F. Harrod* yang melihat bahwa pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab dengan investasi maka akan meningkatkan stock barang modal, yang memungkinkan meningkatkan output. Dalam hal ini investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pemerintah dalam perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan output dikemudian hari dan bersifat jangka panjang. Output yang terakumulasi secara simultan dan berkesinambungan tentu akan memberikan pengaruh terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian terhadap suatu daerah. Seperti pula penelitian yang dilakukan oleh Desi (2010) bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Perkembangan sarana dan prasarana transportasi darat dalam hal ini bertambahnya panjang jalan dan jumlah kendaraan sekalipun relative rendah tetapi memiliki hubungan yang erat dan saling terkait satu sama lain dengan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon.

1. Pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berupa pembiayaan jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas perekonomian yang meningkat akibat tersedianya infrastruktur yang memadai di Kota Ambon sehingga memicu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
2. Pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berupa pembiayaan jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas perekonomian yang meningkat akibat tersedianya infrastruktur yang memadai di Kota Ambon sehingga memicu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Saran

Untuk lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di Kota Ambon, pemerintah perlu meningkatkan pengeluarannya atas infrastruktur jalan baik untuk memperbaiki jalan yang rusak maupun untuk membuka jalan baru agar daerah-daerah yang belum terjangkau transportasi umum dapat terhubung dengan daerah-daerah lain yang ada di Kota Ambon, sehingga dengan demikian akan mempercepat arus perputaran barang dan jasa maupun aktifitas ekonomi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. Di perlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh investasi pemerintah di bidang pembiayaan jalan raya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ambon mengingat saat ini pemerintah pusat akan membangun Ambon Newport sebagai bagian dari infranstruktur pendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku.

Daftar Pustaka

- Adisasmata, Rahardjo, (2010). *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Edisi pertama Mei 2010. Yogyakarta : Graha Ilmu,
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Merauke 2011*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Papua.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kabupaten Merauke Dalam angka 2012*, Badan Pusat Statistik

Kabupaten Merauke, Papua

- Bastias, Desi Dwi. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Deni, Wirawan. (2008). *Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia CSIS*. 37(2). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jotin Khisty, Kent Lall. (2002). *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta : Erlangga.
- Lincoln Arsyad, (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta, BPFE-UGM
- Nicholson, Walter. (2002). *Mikroekonomi Intermediate Dan Aplikasinya Edisi 8*. Jakarta : Erlangga.
- Nurhayani. (2010). *Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Batanghari*. Jambi.
- Ofyar, Z, Tamin (2000) *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Edisi ke-2, Bandung : Penerbit ITB.
- Panggabean, Wina. (2010). *Analisa Peranan Sektor Transportasi Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Samuelson, P.A., William. D. Nordhaus. (2005). *Pengantar Teori Ekonomi Edisi 11*. Jakarta : Erlangga.
- Sarana, Jiwa. (2005). *Peranan Sektor jasa Transportasi Darat Dalam Pemulihan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat*. Universitas Sumatera Utara.
- Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Setyo, Lestanto Bayu. (2002). *Verifikasi Teori Atribusi dalam Fenomena Angkutan Umum*. Universitas Diponegoro.
- Silaban, Yana Juli. (2002). *Analisis Perana Transportasi Darat dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Sudarsana, Dewa Ketut. 2011. *Penyertaan Manfaat Ekonomi Makro Berupa PDRB Dalam Analisis Ekonomi Pembangunan Jalan Penghubung Bali Utara – Selatan*. Universitas Udayana.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta : Raja Grafindo, Persada.